

ANALISIS JURNAL

PERTEMUAN 12

PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA

NAMA : BUNGA CLAUDIA PUTRI

NPM : 2413053209

KELAS : 2F

PRODI : PGSD

Materi ini membahas perjalanan komunitas Tionghoa di Indonesia yang mengalami diskriminasi pada masa Orde Baru. Namun, mereka berhasil memperoleh pengakuan hak-hak kewarganegaraan, salah satunya ditandai dengan terpilihnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta yang merupakan etnis Tionghoa pertama. Gaya kepemimpinan Ahok yang keras, tegas, dan blak-blakan membuatnya berbeda dari Jokowi yang lebih persuasif. Kehadiran Ahok memicu berbagai reaksi di tengah masyarakat, utamanya terkait isu agama dan identitas, yang mencapai puncaknya dengan gelombang protes besar pada 4 November 2016. Selanjutnya, materi ini menyoroti peran Presiden Jokowi dalam menjaga stabilitas dan melindungi seluruh warga negara, termasuk Ahok, sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional yang diembannya. Pesan utama yang dapat diambil adalah pentingnya kepemimpinan yang tegas, adil, dan berpihak pada rakyat dalam konteks keberagaman sosial-budaya Jakarta.

Bagian tinjau pustaka menguraikan dua aspek penting dalam sistem hukum, yakni perlindungan hukum dan penegakan hukum. Kedua elemen ini adalah fondasi yang krusial dalam menjamin keadilan bagi warga negara. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk: preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau tindakan semena-mena dari pihak berwenang sebelum ada keputusan yang diambil. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan pendapat atau keberatan mereka, sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan publik. Di sisi lain, perlindungan hukum represif baru diterapkan setelah terjadi pelanggaran, biasanya melalui jalur peradilan. Bentuk ini mencakup sanksi bagi pelanggar hukum dan berfungsi sebagai langkah akhir dalam perlindungan hukum, dengan tujuan menegakkan keadilan dan ketertiban.

Selanjutnya, penegakan hukum dijelaskan sebagai proses penerapan norma-norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini tidak hanya terkait dengan pelaksanaan undang-undang, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Menurut pendapat para ahli seperti Satjipto Rahardjo dan Soerjono Soekanto, penegakan hukum seharusnya dipahami dari tiga dimensi: sebagai sistem normatif (aturan yang mencerminkan nilai sosial), sistem administratif (interaksi antar lembaga penegak hukum), dan sistem sosial (respon serta dinamika masyarakat terhadap hukum).

Penegakan hukum juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor penentu, antara lain kualitas undang-undang yang berlaku, profesionalisme aparat penegak hukum, sarana dan prasarana yang mendukung, kesadaran hukum masyarakat, serta pengaruh budaya lokal. Semua faktor ini saling berinteraksi dan menentukan sejauh mana efektivitas penerapan hukum di suatu negara.

Oleh karena itu, tinjauan ini menegaskan bahwa sistem hukum yang ideal harus mampu memberikan perlindungan hukum secara adil, serta menjamin penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan.

Bagian pembahasan dalam jurnal ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), termasuk latar belakang pribadi, perjalanan karier politik, gaya kepemimpinan, serta hubungannya dengan isu-isu penegakan hukum. Pembahasan ini disusun secara sistematis dalam beberapa subbagian, sehingga memudahkan pemahaman tentang berbagai aspek penting terkait dengan perjalanan Ahok sebagai tokoh publik.

Pada 3. 1, diuraikan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja Ahok sebelum terjun ke dunia politik. Lahir di Belitong Timur, Ahok menyelesaikan pendidikan di bidang Teknik Geologi di Universitas Trisakti dan melanjutkan studi S-2 di Manajemen Keuangan. Pengalamannya dalam sektor pertambangan dan energi memberikan wawasan praktis mengenai manajemen dan pembangunan, yang nantinya menjadi modal berharga dalam karir politiknya. Keputusan Ahok untuk kembali ke kampung halaman mencerminkan orientasi lokal dan komitmennya terhadap pembangunan daerah.

Pada 3. 2 membahas dengan seksama perjalanan politik Ahok yang bermula dari tingkat lokal. Motivasi Ahok untuk memasuki dunia politik bukanlah demi kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang ia hadapi dan saksikan. Ia dikenal konsisten dalam menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Gaya kampanyenya yang berbeda dari politisi lain, tanpa praktik politik uang, menjadi ciri khas yang membuatnya dikenal luas. Ahok berhasil menjabat sebagai anggota DPRD, Bupati Belitong Timur, anggota DPR RI, hingga akhirnya menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta. Ia membangun citra sebagai politisi yang bersih, tegas, dan fokus pada pelayanan publik, meskipun menghadapi berbagai tantangan politik dan intrik kekuasaan.

Pada 3. 3 menguraikan gaya kepemimpinan Ahok yang dikenal tegas dan blak-blakan. Gaya kepemimpinan ini menjadikannya disukai oleh sebagian masyarakat yang mendambakan perubahan cepat dan nyata di Jakarta, terutama dalam hal pelayanan publik seperti pendidikan (Kartu Jakarta Pintar), kesehatan (Kartu Jakarta Sehat), dan kebersihan (pasukan oranye). Namun, ketegasannya sering kali dianggap sebagai arogansi, yang memicu polarisasi di kalangan masyarakat, terutama dalam isu-isu sensitif seperti penggusuran, reklamasi, dan hubungan dengan DPRD. Meskipun kepemimpinannya dinilai berhasil dalam aspek transparansi dan efisiensi birokrasi, hal ini juga menciptakan konflik sosial dan politik yang tajam, termasuk penolakan dari kelompok-kelompok keagamaan seperti FPI. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan kebijakan, tetapi juga dengan identitas Ahok sebagai seorang minoritas etnis dan agama.

Pada 3. 4 menyoroti konteks hukum dalam kasus yang menimpa Ahok, khususnya tuduhan penistaan agama. Kasus ini menjadi puncak ketegangan sosial-politik yang melibatkan persepsi publik terhadap hukum dan keadilan. Dalam bagian ini, dijelaskan bahwa sistem hukum

Indonesia belum sepenuhnya mampu menunjukkan konsistensi dalam prinsip-prinsip keadilan, karena masih dipengaruhi oleh tekanan politik dan massa. Teks ini mengutip pandangan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait integritas aparat penegak hukum, kualitas moral, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap proses hukum. Aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada saat itu mencerminkan krisis kepercayaan terhadap sistem, bukan semata-mata karena kasus Ahok sebagai individu.

Secara keseluruhan, pembahasan ini mengungkapkan bahwa Ahok adalah sosok yang kompleks tegas, reformis, namun juga menghadapi kontroversi. Ia berusaha membangun pemerintahan yang bersih dan transparan, namun dalam proses itu, ia harus berhadapan dengan budaya politik yang sudah mapan, resistensi dari sebagian masyarakat, serta tantangan hukum yang sering kali memiliki nuansa politis dan identitas. Selain itu, pembahasan ini juga menyoroti bagaimana kepemimpinan, politik, dan penegakan hukum saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam sistem demokrasi yang terus berkembang di Indonesia.

Bagian penutup jurnal ini tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia yang masih jauh dari harapan masyarakat. Penulis menekankan bahwa, meskipun Presiden Jokowi menunjukkan komitmen terhadap reformasi hukum dan tata pemerintahan yang baik dengan menolak intervensi hukum, serta membentuk lembaga antikorupsi dan anti pungli realitas di lapangan tetap mencerminkan tingginya angka kriminalitas, korupsi, dan pelanggaran hukum lainnya.

Lebih dalam, penulis menggarisbawahi akar masalah yang berkaitan dengan karakter aparat penegak hukum dan birokrasi yang sering kali tidak jujur dan tidak amanah, serta ketidakpuasan terhadap pendapatan yang mendorong praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ketidakpercayaan publik terhadap proses hukum menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian segera. Penekanan pada kebutuhan negara dalam menjamin keadilan dan hak-hak warga negara sesuai dengan konstitusi menegaskan pentingnya mengembalikan kewibawaan negara di hadapan rakyat.